

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus. 2013. *Aktor Penyelenggara Pemilu*. Pakar Ipm-Ub. Malang.
- Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pers.Jakarta.
- Az.Nasution. 1999. *Hukum Perlindungan Suatu Pengantar*. cet.1. Daya Wiryajakarta.
- Az.Nasution. 1995. *Konsumen dan Hukum*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Endang Sri Wahyuni. 2003. *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani. 2001. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- I Ketut Putra Erawan Dkk. 2004. *Akuntabilitas Publik Dan Fungsi Pengawasan Dprd*. Kas. Jakarta.
- Janus sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Pt.Citra Aditya Bakti.Bandung.
- Johanes Gunawan. 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.
- Josef Riwo Kaho. 2012. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Polgov. Jogjakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia 
- Maringan. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Mufham Al-Amin. 2006. *Manajemen Pengawasan*. Kalam Indonesia. Jakarta.
- Prayudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Rhenald Kasali. 2007. *Membidik Pasar Indonesia : Segmentasi, Targenting, dan Positioning*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rostamalis. 2005. *Kosmetik, Dasar Kecantikan & Berbusana yang Serasi*. Rineka Cipta. Jakarta.

- Saiful Anwar. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Glora Madani Press. Jakarta.
- Satjipro Rahardjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas. Jakarta.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT Grasindo. Jakarta.
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sudarsono dan Edilius. 2002. *Manajemen Koperasi Indonesia*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Sujamto. 1986. *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Tim Redaksi Tata nusa. 1999. *Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia 1945-1998*. PT. Tatanusa. Jakarta.
- Tranggono. 2007. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ukas. 2004. *Manajemen: Konsep, Prinsip, dan Aplikasi*. Agnini. Bandung.
- Victor M.Situmorang dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Zoemrotin K.Susilo. 1996. *Penyambung Lidah Konsumen*. Puspa Swara. Jakarta.

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Bpom.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175 /Menke s/PER / VIII /2010 tentang Notifikasi Kosmetika

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII /2010 tentang Notifikasi Kosmetika

Peraturan Kepala BPOM nomor HK.03.1.23.12.10.11983 tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika

Jurnal/Skripsi/Website

Abdi Kurniawan, 2020, “Penindakan Kosmetik Ilegal yang Beredar di Kota Padang Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang (STUDI KASUS TAHUN 2017-2018),” Skripsi Sarjana, Universitas Andalas, Padang.

Agus Imron Rosadi, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Kosmetik Krim Pemutih (Racikan),” Tadulako Master Law Jurnal, Vol.5, No.3.

Cut Desi Wanda Sari, 2020, Peran BBPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda Aceh, Skripsi Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Banda Aceh, hlm.17.

Dara Masela, 2021, “Pengaruh Gaya Hidup Remaja Terhadap Penggunaan Kosmetik Cream Temulawak Di Nagari Pitalah Kecamatan Batipuh”, Jurnal Tata Rias dan Kecantikan, Vol.3, No.2.

Harian Haluan, “Hati-hati, Masih Ditemukan Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal di Padang” <https://www.harianhaluan.com/padang/pr-10254327/hati-hati-masih-ditemukan-pelaku-usaha-kosmetik-ilegal-di-padang>, dikunjungi pada tanggal 28 September 2021 Jam 20.02

Hasmiati, DKK, 2021, “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik”, Journal of Lex Generalis, Vol.2, No.2.

Hisma Kahman, 2020, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Palopo”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol.2, No.3.

Niru Anita Sinaga, 2015, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 5, No 2.

Nita Indrawati, “BPOM Minta Masyarakat Selektif Belanja Produk Kosmetik”, <https://padangmedia.com/bpom-minta-masyarakat-selektif-belanja-produk-kosmetik/>, dikunjungi pada tanggal 28 September 2021 Jam 19.01.

Novel Dominika, DKK, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Berbahaya di Indonesia: Suatu Pendekatan Kepustakaan”, NIAGAWAN, Vol 8, No 1.

Reiny Dwinanda, “BBPOM Sumbar: Hindari Produk Kosmetik Pemutih Kulit Instan”, <https://republika.co.id/berita/daerah/sumatra/20/02/28/q6dyfx414-bbpom-sumbar-hindari-produk-kosmetik-pemutih-kulit-instan>, dikunjungi pada tanggal 28 September 2021 Jam 18.52.

Retno Iswari, “Fungsi Kosmetik, Pengertian Kosmetik dan Tujuan Penggunaan Kosmetik”, <https://pintubelajarcerdas.blogspot.com/2017/01/ungsi-kosmetik-pengertian-kosmetik>, dikunjungi pada tanggal 15 Juni 2021 Pukul 22.05.

Ribka Amanda Dera, 2019, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya”, Jurnal Lex Privatum, Vol 7, No 1.

Rizky Adi Yuristyarini, 2015, “Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)”, hlm.1.

Setiono, 2004, Disertasi : “Rule of Law”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Situs Kompas, “Hati-hati masih Banyak Kosmetik Mengandung Zat Berbahaya”, <http://health.kompas.com/read/2014/12/19/135812923/>, dikunjungi pada tanggal 28 September 2021 pukul 19.58 WIB.

Sri Arlina, 2018, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, UIR Law Review, Vol 2, No 1.

